

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional salah satunya adalah Pembangunan Nasional.

Bidang ekonomi dijadikan sebagai titik berat dalam pembangunan nasional. Sebab, ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia. keduanya didorong untuk saling memperkuat, saling terikat dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Base on village*), yaitu 1) Pembangunan kelembagaan, 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Pengembangan ekonomi lokal, dan 4) Pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan proram tersebut, maka berbagai bentuk program pembangunan mulai digalakkan oleh pemerintah, terutama program yang menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari program tersebut adalah dibentuk atau didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri dan di bantu oleh pemerintah setempat. Setiap program yang diterapkan, untuk mengetahui ketercapaian program sangat perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang diterapkan.

Nugroho (2016:9) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan elemen penting dalam sebuah pengambilan keputusan. Evaluasi sangat perlu dilakukan, sebab :

1. Hasilnya akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program yang dijalankan.
2. Menunjukkan seberapa penting untuk dilakukan perubahan dan dibagian mana yang perlu untuk diterapkan perubahan tersebut.
3. Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi bisa ditingkatkan.
4. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan, dan pengambilan keputusan.
5. Membantu pihak yang berkepentingan dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja sebuah program.

Secara umum, evaluasi bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi dan menarik sebuah kesimpulan dari hasil pelaksanaan pengelolaan kegiatan, manfaat yang diberikan, luaran yang dicapai dan dampak dari

kegiatan/program yang telah dilaksanakan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pengambil keputusan dalam rangka perencanaan (*planning*), pelaksanaan/implementasi (*implementation*), pemantauan/pengawasan (*controlling*) dan pengendalian pada program selanjutnya.

Selain itu, dengan mengadakan evaluasi maka program kegiatan yang disusun untuk selanjutnya dapat lebih terarah, efektif dan efisien. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh pembuat keputusan (*decision making*).

Dengan demikian, program kegiatan baru yang akan disusun untuk kedepannya akan lebih terarah dan lebih baik dari sebelumnya. Sebab, setiap kegiatan manajemen akan dikatakan sempurna jika didalam prosesnya dilaksanakan suatu evaluasi. Terutama sekali mengenai penyelenggaraan dana yang sangat rentan dengan isu-isu korupsi, penyalahgunaan wewenang bidang keuangan dan sebagainya. Untuk itu, evaluasi mengenai penyelenggaraan pendanaan sangat perlu dilakukan oleh setiap instansi atau badan usaha yang mengelola keuangan.

Mengevaluasi program melalui proses pengumpulan data atau informasi ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan tentang keberlanjutan sebuah program, diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dalam merencanakan suatu program, hendaknya evaluasi menjadi bagian tak terpisahkan. Sebab, evaluasi dapat diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian program.

Evaluasi memberikan hasil berupa informasi tentang kesuksesan program dan memberikan gambaran bagi pengambil keputusan dalam penyusunan sebuah program, keputusan tentang input program, implementasi program yang mengarah pada kegiatan dan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.

Setiap proses yang dilalui, bukan tanpa hambatan. Penyelenggaraan dana yang sangat rentan dengan kasus-kasus penyelewengan keuangan, haruslah akuntabel dan transparan dalam setiap penggunaan dan pelaporannya.

Untuk itu, evaluasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberhasilan, kekurangan bahkan kegagalan program. Dengan melakukan evaluasi, hasil dari kegiatan tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan program selanjutnya.

Di Indonesia, telah mulai diterapkan berbagai program yang melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Pemerintah tidak hanya terlibat sendiri dalam upaya tersebut. Tapi, masyarakat juga diikutsertakan dalam menjalankan program tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan diaplikasikan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah dalam menyediakan sarana penyaluran modal usaha bagi masyarakat. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam

pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil menengah.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD BUMDes.

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).

Di dalam pembangunan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu

sendiri. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi target atau tujuan dari suatu pembangunan tetapi juga dilibatkan di dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangat penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu kebutuhannya akan berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan. Dalam hal ini partisipasi secara langsung masyarakat desa mutlak diperlukan termasuk pembangunan melalui kegiatan pemanfaatan dana BUMDes yang berbasis potensi lokal.

Seperti yang dijelaskan dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, yaitu BUMDes merupakan suatu badan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Banyak daerah yang tersebar dalam wilayah Indonesia telah mulai diterapkan program pemberdayaan melalui BUMDes tersebut. Meski pun menemui berbagai masalah dalam prosesnya, tapi program tersebut cukup berhasil. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dan perbaikan program terus menerus dilakukan bukan tanpa acuan atau dasar yang jelas. Hal tersebut didasari dari hasil evaluasi program yang dilakukan secara terus menerus. Salah satu daerah yang mendapat program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditambah dengan peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Rokan Hulu, maka beberapa desa di Kabupaten Rokan Hulu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut adalah Desa Kepenuhan Raya yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Badan usaha yang pada awalnya merupakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang kemudian berkembang menjadi Badan Usaha Milik Desa setelah melalui banyak proses. Dalam pengelolaan keuangan atau dana merupakan sebuah program kegiatan yang selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak. Baik mengenai penyelenggaraan dananya, pelaporan maupun pengawasan.

Tidak hanya itu, permasalahan juga datang dari masyarakat yang tergabung sebagai anggota/nasabah. Dengan pemahaman yang masih minim, kesadaran masyarakat mengenai pengembalian pinjaman dana yang digunakan sebagai tambahan modal dalam mengembangkan usaha seringkali terlambat dari tanggal yang telah ditentukan dan disepakati. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, permasalahan tersebut dapat diatasi.

Berbagai kendala lainnya juga sering dijumpai dalam pelaksanaan program. Kekompakan antara pengurus yang pada awalnya masih kurang, setelah mengikuti banyak pelatihan dan arahan dari fasilitator program. Sehingga, program dapat berjalan dengan baik.

Modal awal yang diperoleh untuk dikelola oleh Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan merupakan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 450.000.000,- ditambah dengan dana dari desa dan pihak ketiga, maka total seluruh dana yang dikelola sebesar Rp 525.000.000,-.

Dari dana tersebut, setelah beberapa tahun berjalan diperoleh aset dan omset Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan yang diuraikan pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Aset dan Omset Pertahun

BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya

Tahun	Aset/ Aktifa/ Harta	Omzet/ Keuntungan	Deviden/setoran ke APBDES
2010	Rp 651.922.925	Rp 85.025.140	Rp 8.502.514
2011	Rp 834.862.969	Rp 144.816.705	Rp 144.481.670
2012	Rp 1.666.206.061	Rp 121.742.949	Rp 12.174.294
2013	Rp 1.700.154.612	Rp 129.862.556	Rp 12.986.255
2014	Rp 1.577.321.463	Rp 116.526.477	Rp 11.652.477
2015	Rp 1.752.671.951	Rp 89.890.763	Rp 8.989.076

Sumber : Olah Data BUMDes "Makmur Sejahtera" Kepenuhan Raya 2015

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan bertambah pada setiap tahunnya. Sedangkan omzet, terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengurangan jumlah penyaluran dana simpan pinjam yang digulirkan. Kemudian, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, jumlah aset dan omzet Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan belum diperoleh data yang valid, karena masih dalam proses evaluasi dan pembukuan. Sehingga, ketika Penulis melakukan observasi Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan, data tersebut belum bisa diperoleh.

Dari 2 (dua) penghargaan tersebut dan ditambah dengan semakin meningkatnya aset yang dimiliki, Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan telah melalui banyak proses dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus. Sehingga, keberadaannya yang tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat dan berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, baik fasilitas umum, pendidikan maupun sumber daya manusianya tapi juga mampu bersaing dengan lembaga badan usaha lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Badan Usaha milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan pada setiap bulannya selalu melakukan rapat koordinasi yang wajib diikuti oleh semua pengurus

BUMDes, Pemerintah Desa dan Pendamping Kecamatan. Dalam rapat koordinasi dibahas mengenai perkembangan BUMDes, penyusunan rencana program untuk bulan selanjutnya dan evaluasi kinerja keuangan dan pengelola. Hasil evaluasi dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana bulan selanjutnya. Dalam rapat koordinasi terdapat beberapa poin penting yang dibahas terkait penyelenggaraan dana, yaitu :

- 1) Realisasi program sampai dengan bulan diadakan rapat koordinasi
- 2) Realisasi dana sampai dengan bulan diadakan rapat koordinasi
- 3) Hasil monitoring pengembalian dana perguliran BUMDes "Makmur Sejahtera"
- 4) Pemanfaat yang menunggak dan penagihan pembayaran
- 5) Analisa kemajuan kegiatan/program
- 6) Analisa tingkat partisipasi masyarakat
- 7) Pemberdayaan masyarakat
- 8) Pertumbuhan ekonomi masyarakat
- 9) Penguatan kapasitas kelembagaan
- 10) Rencana program bulan depan

Dibandingkan dengan BUMDes dari desa lainnya yang berdiri di Kecamatan Kepenuhan, BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya merupakan BUMDes yang terbaik. Tidak hanya pengelolaan dan penyelenggaraan dananya saja. Akan tetapi, juga cara kerja dan kinerja pengurusnya. Selain itu, melihat prestasi yang pernah diraih oleh BUMDes ini membuat Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian bentuk

evaluasi yang dilakukan pada BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan dan dampaknya terhadap penyelenggaraan dana yang dilakukan oleh BUMDes tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Evaluasi Penyelenggaraan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan**".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelenggaraan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meng-evaluasi penyelenggaraan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Peneliti

Sebagai persyaratan penyelesaian penulisan skripsi, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

b. Masyarakat dan Pemerintah

Sebagai masukan dan evaluasi dalam pembangunan sosial ekonomi dan pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

c. Civitas Akademika

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisannya sesuai dengan petunjuk penulisan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Univeritas Pasir Pengaraian yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang pengangkatan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai penyelenggaraan dana, bentuk evaluasi yang dilakukan dan dampak evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

Bab ini diuraikan tentang pengertian evaluasi, dampak evaluasi, perencanaan, pelaksanaan/penyelenggaraan dana, pelaporan dan pengawasan, faktor-faktor pentingnya dilakukan evaluasi, indikator-indikator dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, diuraikan juga mengenai kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMAHASAN

Ab ini menjelaskan tentang gamaran umum objek penelitian, karakteristik informan penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Menurut Arikunto (2009:1) evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Dunn dalam Nugroho (2016:36) evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan.

Evaluasi memainkan sejumlah peran penting dalam sebuah keputusan terhadap program yang dijalankan, yaitu :

1. *Pertama*, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja program. Dapat diketahui seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapatdicapai melalui tindakan. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu (contohnya; perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 % pengurangan pengangguran).
2. *Kedua*, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, juga dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok masyarakat) maupun keputusan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

3. *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis keputusan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja program dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang program. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif keputusan penerapan program yang baru atau revisi program dengan menunjukkan bahwa program yang diimplementasikan sebelumnya perlu dikaji ulang atau digantikan dengan program yang baru.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya sebuah program dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kinerja program dengan mencari beberapa alternatif keputusan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode *forecasting* (peramalan).

Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling tepat. Tahap selanjutnya

adalah implementasi program. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (*feed back*) bagi *agenda setting* berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah program dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (*policy assesment*).

Menurut Suryana (2010:7) evaluasi terbagi 2 (dua), yaitu :

1. Evaluasi *Formatif*

Merupakan evaluasi yang dilakukan sebagai sumber yang menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses.

2. Evaluasi *Sumatif*

Merupakan evaluasi yang dilakukan sebagai alternatif yang menyediakan informasi jangka pendek atau informasi jangka panjang untuk menentukan akan menggunakan atau tidak sebuah produk atau proses.

2.1.2 Fungsi Evaluasi

Fattah dalam Suryana (2010:6) mengatakan bahwa evaluasi berfungsi sebagai pengarah kegiatan efektivitas kegiatan. Evaluasi berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi

dan pengujian data atau informasi sebagai acuan untuk pengambilan keputusan (*decision making*).

Suryana (2010:6) mengatakan terdapat 4 (empat) fungsi evaluasi, yaitu :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pelaksana tugas (pengelola/pejabat) dalam melaksanakan tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan pekerjaan
2. Mendidik para pemangku jabatan agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelemahan kebijakan dan kesalah-arahan pekerjaan
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan wewenang agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan

2.1.4 Tujuan Evaluasi

Menurut Riffai dalam Suryana (2010:5), evaluasi memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Evaluasi sebagai pengukur kemajuan
Kemajuan suatu program dapat diketahui dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program yang telah dijalankan.
2. Evaluasi sebagai alat perencanaan

Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan atau alat dalam proses penyusunan sebuah rencana. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran terhadap kesuksesan program yang telah dijalankan.

3. Evaluasi sebagai alat perbaikan

Hasil evaluasi akan menunjukkan baik atau buruk suatu program. Mengalami kemajuan, stagnan (jalan ditempat) atau semakin buruk hasil yang ditunjukkan. Maka, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan program yang akan dijalankan selanjutnya.

Sedangkan, Fattah dalam Suryana (2010:4) menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, pelaksanaan (*input*)/ implementasi program, luaran atau hasil dari program dan dampak program.

Maka, dapat disimpulkan bahwa evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan dari pengalaman mengenai pengelolaan kegiatan, manfaat, luaran dan dampak dari kegiatan pembangunan atau program yang telah dilaksanakan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan/implementasi, pengendalian program selanjutnya dan pengawasan.

2.1.5 Indikator Evaluasi

Menurut Dunn dalam Nugroho (2016:8), dalam pelaksanaan evaluasi digunakan beberapa indikator untuk memberikan arahan bagi evaluator, yaitu :

1. Efektifitas

Merupakan keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektifitas merupakan ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman.

2. Efisiensi (Efficiency)

Merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien

ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

3. Kecukupan (Adequacy)

Merupakan tingkat efektifitas memuaskan tingkat kebutuhan, nilai atau kesempatan. Kriteria kecukupan menekankan pada hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan/Kesamaan (Equity)

Indikator ini erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan pada distribusi dari usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas (Responsiveness)

Merupakan respon atau kesigapan pengelola dalam melakukan penyelenggaraan dana, pelaporan dan pelayanan kepada masyarakat.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya (true value / correct result). Program kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan dilaksanakan dengan akurasi yang tepat.

2.1.6 Penyelenggaraan Dana

Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa yang dimuat secara detail. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan

bahwa prioritas penggunaan dana diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang yang dilaksanakan melalui lembaga pemberdayaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama), embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Pada Pasal 4 ayat (4) lebih ditegaskan lagi bahwa yang mengelola dana yang disalurkan untuk kegiatan tersebut pada adalah BUMDes atau BUMDes Bersama.

Sedangkan pada Pasal 4 ayat (5) dikatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat di akses masyarakat.

Dari Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap penggunaan dana yang dikelola/diselenggarakan oleh BUMDesa atau pun BUMDes Bersama baik berupa biaya operasional maupun yang disalurkan melalui kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat harus akuntabel, transparansi dan jelas.

Sehingga, penyelenggaraan dana yang dilakukan sesuai dengan tujuan program yang telah disusun dalam perencanaan program.

Keberadaan BUMDes tidak hanya membantu pada aspek permodalan serta pengelolaan organisasi yang profesional. Namun,

yang lebih utama adalah akses terhadap pasar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes.

Pengelolaan dana melalui BUMDes yang menjadi mitra BUMN, menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi berbagai penyelewengan pemanfaatan dana desa. Penyelewengan dana desa yang muncul sebagai akibat dari lemahnya partisipasi masyarakat. Melalui BUMDes, mekanisme pembentukan dan operasionalnya telah diatur dalam berbagai regulasi, maka pemanfaatan dana desa menjadi lebih terkendali yang pada akhirnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Dunn dalam Nugroho (2016:11) mengatakan bahwa penyelenggaraan dana merupakan kegiatan penyaluran dana/biaya yang dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut kepada penerima dana, baik berupa dana kegiatan pembangunan maupun dana bantuan modal usaha.

Dunn dalam Nugroho (2016:11) menegaskan bahwa setiap dana yang digunakan baik untuk bantuan modal usaha (simpan pinjam ataupun yang disalurkan kepada penerima harus dilakukan secara akuntabel dan transparasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat dan menghindari terjadinya penyelewengan wewenang dan masalah keuangan dalam lembaga keuangan yang memberikan dana bantuan modal usaha.

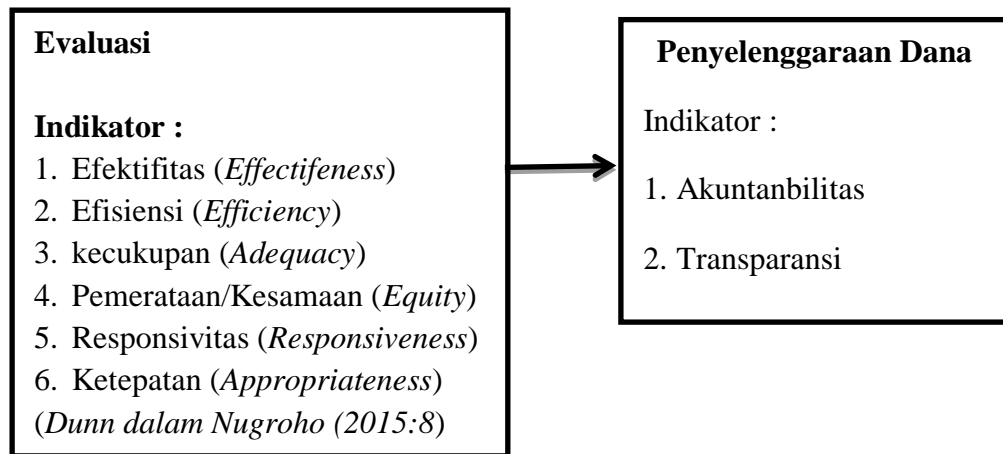
Pelaporan yang dilakukan oleh pihak pengelola tidak hanya sebagai syarat formalitas kepada pemerintah mengenai penggunaan biaya operasional dan penyaluran dana. Akan tetapi, pelaporan juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah didapat oleh masyarakat secara luas, seperti papan pengumuman atau mading.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul
1	Dendhi Agung Nugroho	2016	Evaluasi Penerapan dan Dampak Program BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)
2	Khairul Amri	2015	Evaluasi Program BUMDes

2.2 Kerangka Alur Pikir

Kerangka konseptual menjelaskan arah penelitian, sehingga nantinya dapat tergambar tujuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi penyelenggaraan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang diuraikan pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1. Kerangka Alur Pikir

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tinjauan teoritis yang telah diuraikan, maka Penulis mengemukakan sebuah hipotesis, yaitu:

”Evaluasi memiliki dampak terhadap penyelenggaraan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ”Makmur Sejahtera” Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian yang Penulis pilih dalam penelitian ini adalah di BUMDes Makmur Sejahtera yang berada di Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam penelitian ini yang akan Penulis teliti adalah mengenai penyelenggaraan dana BUMDes Makmur Sejahtera, bentuk evaluasi yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap kinerja program BUMDes Makmur Sejahtera.

3.2 Informan Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:364) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Sebab, penelitian kualitatif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang ada pada situasi sosial dan hasil kajiannya ditransferkan ketempat lain yang memiliki kasus situasi sosial yang sama.

Populasi pada penelitian ini adalah pengurus BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya yang disajikan pada Tabel 3.2.1 berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Pengurus dan Anggota BUMDes Makmur Sejahtera

No	Jabatan	Jumlah
1	Pengawas	1
2	Kepala Desa/Komisaris	1
3	Pendamping Kecamatan	1
4	Direktur	1
5	Ka. Unit Simpan Pinjam	1
6	Staff	3
Jumlah		8

Sumber : Olah Data BUMDes "Makmur Sejahtera" Kepenuhan Raya 2017

2. Sampel

Sugiyono (2014:364) menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tapi narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian, serta tidak disebut sampel statistic tapi sampel teoritis.karena, tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling (Sampling Jenuh)* adalah teknik penentuan sampel yang mengambil semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30

orang(Sugiyono:2014;358-369). Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sampel yang menjadi narasumber pada penelitian adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera yang berjumlah 8 (delapan) orang narasumber.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data-data dari hasil evaluasi yang berupa dokumen (file), rencana program (*planning*), pelaksanaan/implementasi program (*implementation*), pelaporan (*report*), dan pengawasan (*controlling*) serta hasil wawancara secara mendalam (*Depth Interview*).

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah profil BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan, dokumentasi, observasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, teknik pengumpulan

data observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono:2017;224-225).

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian, lingkungan dan sarana kerja yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Esterberg dalam Sugiyono (2017:232) menyatakan bahwa wawancara merupakan hatinya penelitian sosial. Bila and amelihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada wawancara, baik yang standar maupun yang mendalam.

Pada penelitian kualitatif, sering digabungkan tehnik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada didalamnya (Sugiyono:2017;232).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik yang berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, *biografi*, peraturan dan kebijakan), gambar (foto, gambar hidup/video, sketsa dan sebagainya) atau karya-karya menumental seseorang berupa tulisan, gambar, patung, film dan lain-lain (Sugiyono:2017;240).

3.5 Definisi Operasional

Arikunto (2006:118) menjelaskan bahwa variable adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta atau pun angka.

Agar penelitian terfokus pada satu pandangan dari begitu banyak pandangan tentang ukuran variabel dari pakar dalam landasan teori, Peneliti menjelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel yang dilengkapi indikator dan skala pengukuran variabel penelitian yang dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<p>Evaluasi : Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. (Arikunto:2009:1)</p>	<p>1. Efektifitas (<i>Effectifeness</i>) 2. Efisiensi (<i>Efficiency</i>) 3. kecukupan (<i>Adequacy</i>) 4. Pemerataan/Kesamaan (<i>Equity</i>) 5. Responsivitas (<i>Responsiveness</i>) 6. Ketepatan (<i>Appropriateness</i>) (Dunn dalam Nugroho (2016:8))</p>	Ordinal
2	<p>Penyelenggaraan Dana : Penyelenggaraan dana merupakan kegiatan penyaluran dana/biaya yang dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan atersebut kepada penerima dana, baik berupa dana kegiatan pembangunan maupun dana bantuan modal usaha. (Dunn dalam Nugroho :2016:11))</p>	<p>1. Akuntabilitas 2. Transparansi (Dunn dalam Nugroho (2016:12))</p>	Ordinal

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono:2017;222).

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan data atas temuannya (Sugiyono:2017;222).

3.7 Teknik Analisi Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trianggulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif). Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Kemudian dicari data

berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi) ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono:2017;245).

Nasution dalam Sugiyono (2017:245) analisis data dilakukan telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2014), analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan tinjauan pustaka dengan menggunakan media seperti *tape recorder*, kamera dan lembar angket (daftar pertanyaan).

2. Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini, hasil penelitian mulai dibuat kesimpulan yang masih bersifat sementara tapi tetap berdasarkan data yang diperoleh.

3. Triangulasi

Merupakan proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini, beberapa kemungkinan

bisa terjadi, diantaranya 1) satu sumber *koheren* (cocok) dengan sumber lain, 2) satu sumber data berbeda dari sumber lain tapi tidak bertentangan dengan sumber lainnya, dan 3) satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya.

4. Kesimpulan Akhir

Peneliti mengulangi tahap pertama sampai tahap ketiga dengan cara berulang-ulang sebelum membuat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir dibuat ketika seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian sudah sampai pada titik jenuh.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa

Desa Kepenuhan Raya merupakan desa yang pertama kali untuk wilayah Kecamatan Kepenuhan penempatan PPD untuk fase pertama (tahun 2005) yang wilayahnya Ekstransmigrasi Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR Sawit), yang masing-masing kepala keluarga mempunyai satu kapling (2 Ha) sawit, setengah hektar lahan pekarangan rumah dari desa Deapsitif menjadi desa sejak tahun 1996/1997.

Desa Kepenuhan Raya atau yang lazim disebut SP-1 ini terletak disebelah utara Kecamatan Kepenuhan tepatnya sekitar 5 Km dari ibu kota kecamatan dengan kondisi jalan penghubung masih jalan tanah berbatu, sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten lebih kurang berjarak 60 Km.

4.1.2 Keadaan Demografis/Penduduk

Saat ini jumlah penduduk Desa Kepenuhan Raya sebanyak 505 KK dengan perincian 764 orang laki-laki dan 738 orang perempuan dengan jumlah total penduduk 1502 jiwa. Dalam heterogenan masyarakat yang berdomisili di Desa Kepenuhan Raya ini mayoritas penduduknya berasal dari Jawa, karena pada transmigrasi pola PIR untuk SP-1 pembagian dan penempatan masyarakatnya adalah 25 : 75 artinya masyarakat tempatan/lokal 25 % dari 500 KK pada masa itu dan 75 % merupakan pendatang yang berasal dari luar Riau (Jawa, dll). Pada saat ini jumlah

antara penduduk tempatan dengan pendatang hampir sama. Karenakan telah banyaknya masyarakat pendatang yang menjual lahan perkebunan dan rumah yang dimilikinya kepada masyarakat tempatan.

Penghidupan masyarakat Desa Kepenuhan Raya sebagian besar berasal dari perkebunan sawit dengan total hasil sawit masyarakat perbulannya sekitar 250 ton dengan kondisi produktif karena masih berumur rata-rata 9 – 10 tahun, dan sebagian kecil dari usaha dagang/jasa dan Pegawai Negeri/Swasta.

Bila ditinjau dari sumber daya manusia, penduduk Desa Kepenuhan Raya telah berpendidikan SMA dan sebagian berpendidikan Sarjana. Masyarakat desa memiliki semangat kerja (etos kerja) yang sangat tinggi. Masyarakat yang heterogen tersebut hidup dalam nuansa religius, hal ini terbukti dengan adanya rasa saling menghargai antar pemeluk agama, walaupun sekitar 99 % penduduknya memeluk agama Islam.

4.1.3 Potensi Umum Desa

Karena desa Kepenuhan Raya merupakan desa ekstrasmigrasi dengan pola PIR (sawit), maka potensi terbesar adalah adanya kebun sawit masyarakat sekitar 1.010 Ha. Dimana kreditnya sebagian besar telah selesai (lunas). Selain itu lahan pekarangan rumah warga seluas 0,5 Ha sebagian besar dimanfaatkan dengan tanaman sawit, coklat, kelapa, pisang, dan lain-lain.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Kepenuhan Raya antara lain adalah Mesjid sebanyak 2 unit, Mushalla/Langgar 10 unit, Poliklinik 1 unit, Kantor Kepala Desa, kantor BUMDes Makmur Sejahtera, Kantor BPD Desa Kepenuhan Raya, Taman Kanak-kanak 1 unit, Sekolah Dasar 1 Unit, SLTP/MTs 3 unit, SMK Negeri 1 Kepenuhan 3 unit, Sekolah PDTA 1 Unit, lapangan bola 1, lapangan volly 3, lapangan bulu tangkis 6, pos kamling 15 unit di tambah PAUD 1 unit, Pos Yandu 1 unit, Rumah Dinas 2 Unit.

4.1.5 Gambaran Umum BUMDes "Makmur Sejahtera"

BUMDes "Makmur Sejahtera" pada awal berdirinya merupakan sebuah Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam atau lebih dikenal dengan istilah UED-SP yang didirikan pada tahun 2005. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun, UED-SP "Jaya Makmur" diganti dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" pada tahun 2009.

BUMDes "Makmur Sejahtera" didirikan pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa No. 8 Tahun 2009 Tentang Pendirian BUMDes "Makmur Sejahtera" telah memiliki kantor sendiri yang berada di Jl. H.R Soebrantas Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

a. Visi BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya

Terwujudnya ekonomi kerakyatan menuju masyarakat Desa Kepenuhan Raya yang mandiri, sejahtera, berdaya saing melalui

pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan misi kabupaten Rokan Hulu Membangun Desa dan Menata Kota.

b. Misi BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya

Misi BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan adalah :

- 1) Menciptakan Desa Kepenuhan Raya yang masyarakatnya yang Relegius, Beradat dan Berbudaya serta melestarikan alam yang indah (Negeri Suluk, Berpusakana Hijau) melalui Badan Usaha Milik Desa
- 2) Menciptakan Basis Pendapatan Asli Desa demi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.
- 3) Memberi bantuan Modal Usaha dalam bentuk Pinjaman dengan syarat dan cara yang mudah.
- 4) Mengembangkan Usaha Ekonomi, Masyarakat melalui Pembinaan / Pendampingan Usaha, baik Keadministrasian, Management, Keorganisasian/ Kelembagaan serta Pendampingan kewirausahaan.
- 5) Kemandirian dan keberlanjutan usaha Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan melalui usaha-usaha yang sah dan Halal.
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- 7) Pengembangan jaringan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- 8) Mendukung fungsi dan peran pemerintah lokal dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

- 9) Membangkit semangat berusaha bagi masyarakat sehingga tercipta daya saing yang sehat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Modal awal yang dimiliki BUMDes "Makmur Sejahtera" diuraikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Modal Awal BUMDes "Makmur Sejahtera"

No	Sumber Modal	Rp	Keterangan
1	Pemerintah Desa	20.000.000	Tanah/Lahan
2	Dana Desa	100.000.000	Hibah
3	Bank Riau Kepri	100.000.000	Pinjaman
4	Cadangan Modal	45.000.000	Bangunan
5	Pihak Ketiga	250.000.000	Deposito
6	APBD Kab. Rokan Hulu	450.000.000	Hibah
	Jumlah	965.000.000	-

Sumber : Olah Data Bag. Administrasi BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Tahun 2017

4.1.6 Realisasi Program yang Dicapai Tiap Bulan

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan sampai bulan dilakukan penelitian, Badan Usaha Milik Desa "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi pengelola BUMDes Makmur Sejahtera setiap bulannya
2. Penagihan ke pemanfaat yang menunggak.
3. Monitoring pengembalian BUMDes Makmur Sejahtera
4. Pembuatan Laporan BUMDes

4.1.7 Rencana Program Bulan Depan

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada bulan depan dalam Program Pemberdayaan Desa, yaitu :

1. Rapat Kordinasi pengurus BUMDes setiap bulannya
2. Memantau perkembangan BUMDes Makmur Sejahtera.
3. Monitoring pengembalian BUMDes Makmur Sejahtera.
4. Penagihan ke pemanfaat yang menunggak
5. Pembuatan Laporan BUMDes
6. Bekerja sama dengan Bank BJB atau Bank Riau di Pasir Pengarayan
7. Membuka Layanan Pembayaran secara Online

4.1.8 Analisa Kemajuan Kegiatan

Target yang ingin dicapai dari hasil kegiatan yang dilakukan setiap bulannya selalu mengalami kemajuan, baik dibidang kepengurusan, penyaluran dana pinjaman modal kepada masyarakat/anggota, kegiatan simpan/pinjam (tabungan) dari nasaah/anggota, penanganan masalah tunggak atau pun keterlabatan pembayaran angsuran dari anggota/nasabah dan permasalahan lainnya dapat diselesaikan dengan baik.

4.1.9 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang yang bergabung menjadi nasabah/anggota BUMDes ”Makmur Sejahtera”. Sampai dengan awal tahun 2019, telah tercatat sebanyak orang anggota/nasabah.

4.1.10 Pemberdayaan Masyarakat

Pada pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang menyadari betapa pentingnya peranan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan, baik itu sebagai perencana, pelaksana maupun sebagai pemelihara. Masyarakat sudah bisa membuat proposal atau usulan kegiatan terutama untuk kegiatan ekonomi, menganalisa usaha ekonomi mereka sendiri dan mulai tumbuhnya kesadaran untuk menabung. Masyarakat juga proaktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pengurus BUMDes "Makmur Sejahtera". Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat saat mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa, terutama kaum perempuan.

4.1.11 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi masyarakat di lokasi Program Pemberdayaan Desa di Desa Kepenuhan Raya sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Masyarakat sudah bisa mengembangkan usaha dari dana pinjaman modal usaha dari BUMDes "Makmur Sejahtera" dengan pembayaran angsuran pinjaman pada setiap bulannya.

4.1.12 Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Dilihat dari kelembagaan di Desa Kepenuhan Raya, khususnya BUMDes "Makmur Sejahtera" menunjukkan kelembagaan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian tugas yang jelas. Kantor BUMDes selalu buka setiap hari pada jam kerja yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai pukul 14.00 wib–17.00 wib.

Pada saat pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal gajian kebun sawit masyarakat, yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya. Pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 pada setiap bulannya atau setelah laporan BUMDes "Makmur Sejahtera" selesai, maka seluruh pengurus BUMDes "Makmur Sejahtera" masuk kerja setiap hari kecuali pada hari Minggu dan hari libur lainnya. Ketentuan tersebut berlaku pada setiap bulannya.

4.1.13 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang sering dijumpai dilapangan, yaitu :

1. Adanya sebagian anggota/nasabah yang menunggak pembayaran angsuran pinjaman modal usaha.
2. Kurangnya kesadaran beberapa anggota/nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu.
3. Ketika sumber pendapatan utama anggota/nasabah mengalami penurunan (buah sawit trek) yang mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran pinjaman.
4. Pengambilan tabungan secara besar-besaran. Jika hal tersebut terjadi secara terus menerus maka akan menyebabkan semakin sedikitnya jumlah dana yang tersedia di BUMDes. Selain tunggakan, pengambilan tabungan secara besar-besaran bisa menyebabkan BUMDes *colaps*.

4.1.14 Penyelesaian

Upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan hingga saat ini adalah :

1. Memberikan peringatan pertama kepada anggota/nasabah yang menunggak, baik melalui surat maupun via-telfon.
2. Melakukan kunjungan/penagihan langsung ke rumah pemanfaat/anggota.
3. Pemanggilan anggota/nasabah yang menunggak terlalu lama dan tidak meng-indahkan peringatan yang disampaikan.
4. Penyelesaian dengan melibatkan pemerintah pusat

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Sebelum sampai pada analisis dan hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran umum atau deskripsi karakteristik informan penelitian yang menjadi sampel obyek penelitian ini. Jumlah informan penelitian dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang yang diambil dengan menggunakan metode sensus. Secara lengkap data tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Karakteristik Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini, usia narasumber/informan penelitian yang menjadi sampel atau obyek pada penelitian ini diuraikan pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
25-35	4	50
36-42	3	37,5
43-55	1	12,5
Jumlah	8	100

2. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah narasumber/informan penelitian berdasarkan jenis kelamin dijelaskan pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	6	75
Perempuan	2	25
Total	8	100

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 (enam) orang jumlah informan penelitian berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 2 (dua) orang jumlah informan penelitian berjenis kelamin perempuan.

3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan juga sangat penting dalam pemilihan informan penelitian (narasumber) yang akan menjadi sampel dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Sebab, tingkat pendidikan seseorang

mencerminkan tingkat intelektualitas yang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya.

Tingkat pendidikan informan penelitian pada penelitian ini adalah SMP sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 3 (tiga) orang dan Sarjana sebanyak 4 (empat) orang. Untuk lebih lengkapnya, tingkat pendidikan narasumber dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sarjana	4	50
2	SMA	3	37,5
3	SMP	1	12,5
Jumlah		8	100

4.3 Analisis Data Penelitian

4.3.1 Pengumpulan Data Mentah

Kegiatan pada tahap awal, Penulis melakukan pengumpulan data mentah dengan melakukan pengecekan beberapa dokumen/file BUMDes "Makmur Sejahtera", gambar-gambar/foto dokumentasi kegiatan usaha masyarakat dan kondisi desa, hasil wawancara dengan pengurus BUMDes "Makmur Sejahtera". Semua data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dilapangan untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui dilapangan.

4.3.2 Penyimpulan Sementara

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pengurus BUMDes "Makmur Sejahtera", melihat dan mengkaji dokumen-dokumen penyelenggaraan dana yang dilakukan dengan anggota/nasabah BUMDes "Makmur Sejahtera" dan dokumen-dokumen hasil evaluasi dari pihak terkait dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan dana yang dilakukan oleh pihak pengurus BUMDes "Makmur Sejahtera" sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan petunjuk dalam peraturan pemerintah dan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait memberikan gambaran bahwa hasil evaluasi berdampak terhadap penyelenggaraan dana pada BUMDes "Makmur Sejahtera". Dapat dilihat dari setiap keputusan ataupun kebijakan yang dibuat selalu mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan. Perbaikan-perbaikan program maupun kegiatan dilakukan secara terus menerus. Sehingga, BUMDes "Makmur Sejahtera" mampu meraih prestasi kerja yang terbaik ditingkat Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 2 (dua) kali.

Namun, kesimpulan ini masih bersifat sementara. Untuk lebih meyakinkan dan memperoleh hasil yang lebih tepat dan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian, Penulis kembali melakukan penelitian terhadap sampel dan subyek penelitian dengan menggunakan metode triangulasi atau menggabungkan beberapa metode pada waktu yang bersamaan yaitu observasi, wawancara sekaligus dokumentasi.

4.3.3 Trianggulasi

Untuk lebih memastikan hasil penelitian yang diperoleh, Penulis kembali melakukan pengkajian terhadap sampel dan subyek penelitian dengan melakukan wawancara dalam bentuk diskusi dengan pengelola/pengurus, observasi dan dokumentasi (pengambilan foto/gambar dan pengkajian dokumen/file yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana) pada waktu yang bersamaan.

4.3.4 Penyimpulan Akhir

Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang berulang-ulang terhadap hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sampel dan subyek penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan dana pada BUMDes "Makmur Sejahtera".

4.4 Pembahasan

Sepanjang berdirinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kepenuhan Raya telah mengalami 2 (dua) kali perubahan nama, yaitu :

1. UED-SP "Jaya Makmur" (Tahun 2005 s/d Tahun 2010)
2. BUMDes "Makmur Sejahtera" (Tahun 2010 s/d Sekarang)

Pergantian nama tersebut merupakan semboyan diharapkan mampu memberikan motivasi kepada pengelola dan masyarakat untuk memakmurkan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Dari nama tersebut dapat dilihat

bahwa tujuan didirikannya BUMDes Makmur Sejahtera adalah salah satu elemen penting pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat desa masih menyanggah nama UED-SP "Jaya Makmur", sebuah penghargaan di tahun 2008 menjadi penghargaan pertama yang diperoleh sebagai Pengelola UED-SP Terbaik III (Tiga) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan prestasi tersebut dan kinerja (program dan pengelola) yang baik, badan usaha ini kemudian mendapat izin untuk mengembangkan program menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maka, dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Sejahtera" pada tanggal 21 Desember 2009 (Kpts. Nomor 08 Tahun 2009).

Pada tahun 2017, BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan kembali mendapatkan sebuah penghargaan sebagai BUMDes Terbaik X dengan kategori Berpartisipasi Aktif Tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Dari tahun ke tahun, berbagai perbaikan dan peningkatan kompetensi selalu dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas kinerja program.

Hal tersebut tak terlepas dari evaluasi yang dilakukan setiap bulannya. Tidak hanya capaian target yang dibahas dalam evaluasi tapi juga permasalahan-permasalahan yang dijumpai di lapangan dan mencari solusi atau penyelesaian/penanganan masalah. Sehingga, target program tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan di BUMDes "Makmur Sejahtera" memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan dana pada BUMDes tersebut. Tidak hanya itu, hasil evaluasi juga selalu dijadikan bahan acuan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyusunan rencana kedepan dan penyelesaian masalah.

Evaluasi yang dilakukan dengan memperhatikan poin-poin penting yang menjadi tolok ukur dalam kegiatan penyelenggaraan dana, yaitu :

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Membandingkan antara target yang ingin dicapai dengan hasil yang diraih dapat dikatakan kegiatan penyelenggaraan dana sudah efektif. Hal tersebut dilakukan dengan pengkajian permasalahan yang ditemui dilapangan dan upaya-upaya penyelesaian yang terus dilakukan.

Perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja dilakukan seccara terus menerus guna meningkatkan efektifitas program.

Dengan demikian, setiap program yang diterapkan didesa Kepenuhan Raya Keccamatan Kepenuhan selalu berjalan dengan baik. Desa menjadi lebih baik dengan pembangunan yang melibatkan kerjasama dari masyarakat, tingkat pendidikan yang kian membaik, mutu kesehatan yang terjamin dan yang paling utama dalam kegiatan BUMDes adalah semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, masyarakat pun semakin terbiasa dengan etos kerjasama. Setiap kegiatan yang dilakukan di Desa Kepenuhan Raya

Kecamatan Kepenuhan selalu mendapat dukungan yang baik dari masyarakat setempat. Apapun program yang masuk dan diterapkan di desa tersebut, selalu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan pihak pemerintah desa.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat ini menjadi salah satu bentuk efektifitas kegiatan yang dilakukan. Karena, setiap kegiatan yang dilakukan akan berhasil dan efektif jika mendapat dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Sehingga, pemerintah desa tidak akan bekerja keras secara sendiri agar program yang dilakukan berhasil dan sukses.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Dalam setiap usaha atau kegiatan, tingkat efisiensi selalu berdampingan dengan efektifitas.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Setiap program atau kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa mencapai 100 % keberhasilan. Akan ada permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan dengan baik akan meningkatkan kesuksesan hasil yang dicapai.

4. Pemerataan/Kesamaan (*equity*)

Di BUMDes "Makmur Sejahtera" tidak ada perbedaan perlakuan pelayanan yang diberikan kepada setiap anggota/nasabah. Penyaluran dana pinjaman, bunga tabungan dan penyelesaian masalah diperlakukan sama bagi setiap anggota/nasabah.

Sehingga, setiap anggota/nasabah merasa memiliki BUMDes "Makmur Sejahtera" dan mematuhi setiap ketentuan-ketentuan dan menerima semua kebijakan yang dikeluarkan. Sebab, semua ketentuan dan kebijakan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat/anggota.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas pengurus BUMDes "Makmur Sejahtera" dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kesigapan dalam kinerja yang diberikan yaitu 1) penyelenggaraan dana, 2) pelaporan, dan 3) pelayanan kepada anggota/nasabah.

1) Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana kepada anggota/nasabah dilakukan dengan respon yang cepat, tidak berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Penyaluran dilakukan dengan cepat setelah dilakukan verifikasi kelayakan kriteria peminjam dengan tujuan agar segera bisa dimanfaatkan oleh anggota/nasabah. Sehingga, permasalahan yang dihadapi oleh anggota/nasabah dapat segera diselesaikan dan usaha yang dijalankan oleh anggota/nasabah dapat segera berjalan.

2) Pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan melibatkan seluruh pengurus. Dalam penyusunan dan pembuatan laporan hasil kegiatan pada setiap bulannya dilakukan dengan kerjasama seluruh pengurus. Setiap pengurus memiliki tanggung jawab yang sama dalam pelaporan. Sehingga, tidak ada bagian dari kegiatan yang tidak masuk dalam

laporan dan penyampaiannya kepada pengawas dan instansi terkait tidak terlambat.

3) Pelayanan

Pelayanan kepada setiap anggota/nasabah tidak dibeda-bedakan. Setiap anggota/nasabah diberikan pelayanan dan penanganan masalah dalam bentuk yang sama.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin tiap bulannya, kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam rencana kegiatan program dapat dilaksanakan dengan akurasi yang tepat.

7. Akuntabilitas

Penyaluran dana pinjaman modal usaha kepada anggota/nasabah selalu dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang tepat. Tidak hanya itu, setiap penyelenggaraan dana yang dilakukan, baik untuk pinjaman modal maupun untuk operasional BUMDes selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

8. Transparansi

Penyelenggaraan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap sumber dana, penyaluran dana, penggunaan dana, penyelesaian masalah dan capaian target kerja tidak hanya disampaikan dalam laporan bulanan BUMDes "Makmur Sejahtera". Tapi juga disampaikan kepada

masyarakat (anggota/nasabah), baik pada saat rapat tahunan anggota/nasabah maupun ditempelkan pada papan informasi. Sehingga, seluruh masyarakat Desa Kepenuhan Raya dapat melihat dan mengetahui pelaksanaan program secara keseluruhan di BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan.

Selain itu, Penulis juga melakukan wawancara mengenai aktivitas yang dilakukan di BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya yang melibatkan seluruh pengurus dalam waktu yang sama, diwakili oleh Direktur BUMDes dan diikuti oleh seluruh pengurus BBUMDes, yaitu :

Apakah penyelenggaraan dana di BUMDEs Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya sudah sesuai dengan SOP atau pearturan yang di keluarkan oleh pemerintah ?

Penyelenggaraan dana di BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya tidak memiliki SOP melainkan dilakukan sesuai dengan pertauran pemerintah yang dikeluarkan.

Antara dokumen/proposal pengajuan pinjaman modal usaha dari anggota dengan pencairan sesuai ? Baik jumlah orang maupun jumlah uang.

Ya. Antara jumlah anggota yang meminjam dengan jumlah uang yang dicairkan sesuai.

Apakah dana yang direalisasikan sama dengan yang tertera pada laporan bulanan ?

Setiap dana yang direalisasikan sama dengan yang disampaikan dalam laporan bulanan BUMDes.

Setiap proposal pinjaman yang diajukan oleh anggota dilakukan verifikasi kelayakan ?

Ya. Setiap proposal pengajuan pinjaman selalu dilakukan erifikasi terlebih dahulu.

Realisasi dana yang dilakukan selalu ditempelkan di papan pengumuman ?

Ya, ada. Upaya ini dilakukan dengan tujuan transparansi dana kepada seluruh masyarakat Desa Kepenuhan Raya, terutama anggota dan nasaah BUMDes Makmur Sejahtera.

Apakah ada pertemuan antara pengurus dengan anggota/nasabah ?

Ada. Pertemuan dilakukan pada setiap satu tahun sekali, yaitu dalam agenda Rapat Akhir Tahun (RAT).

Bagaimana bentuk penyelesaian masalah tunggakan yang dilakukan ?

Bentuk penyelesaian permasalahan tunggakan yang dilakukan hingga saat ini adalah :

- 1) Memberikan peringatan pertama kepada anggota/nasabah yang menunggak, baik melalui surat maupun via-telfon.*
- 2) Melakukan kunjungan/penagihan langsung ke rumah pemanfaat/anggota.*

3) *Pemanggilan anggota/nasabah yang menunggak terlalu lama dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan.*

4) *Penyelesaian dengan melibatkan pemerintah pusat*

Selain masalah tunggakan, apakah ada permasalahan lain yang sering ditemui oleh pengurus ?

Selain masalah tunggakan yang dihadapi BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya adalah pada waktu-waktu tertentu nasabah mengambil semua tabungan secara besar-besaran. Hal tersebut bisa menyebabkan seluruh dana yang tersimpan di BUMDes habis. Dan bisa menyebabkan BUMDes hampir coleys.

Dari manakah sumber gaji pengurus ?

Sumber gaji pengurus berasal dari dana pinjaman yang dikelola oleh pengurus.

Apakah ada dilakukan evaluasi dan monitoring dari pengawas atau instansi terkait ?

Ada. Evaluasi dan monitoring dilakukan setiap satu kali dalam sebulan melalui laporan bulanan.

Bagaimanakah proses penyusunan laporan bulanan ?

Penyusunan laporan bulanan dilakukan dengan melibatkan semua pengurus.

Dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi memberikan dampak yang signifikan terhadap

penyelenggaraan dana di BUMDes "Makmur Sejahtera" Desa Kepenuhan
Raya Kecamatan Kepenuhan.